

Begini Penjelasan Inspektorat Soal Penyalahgunaan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://klikkalsel.com/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-15.56.25-scaled.jpeg>

Kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi baru-baru ini di Tabalong jadi perhatian serius Inspektorat Kabupaten Tabalong. Inspektorat Tabalong menilai kesalahan yang secara umum terjadi disebabkan adanya ketidakpahaman aparat desa. “Biasanya tak paham soal peraturan perundang-undangan,” ucap Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, Yuzan Noor di Ruang Kerja, Senin (31/1/2022).

Selain itu, penyebab lainnya yaitu ketidakmampuan mensinergikan uang yang didapat dengan kebutuhan masyarakat “Antara kebutuhan real masyarakat dengan program-program yang disusun,” ucapnya.

Menurutnya, mengenai ketidakpahaman tersebut ada yang dari kepala desa hingga perangkat tidak memahami, ada juga kepala desa memahami namun bawahannya seperti Kasubag Keuangan atau Kaur Keuangan tidak memahami secara baik. “Mengelola keuangan desa itu dari kepala desa sampai ke aparatnya,” tuturnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabalong, Erwan Mardani melalui Kabid Pembinaan Administrasi Desa, Fahrudin mengatakan, bahwa pihaknya melakukan sosialisasi setiap tahun dan bimbingan teknis. “Seandainya ada

argumen, aparat kurang dapat informasi atau ketidaktahuan maka itu bukan alasan yang mendasar,” ucapnya. Menurutnya, adanya masalah biasanya terjadi pada realisasinya.

Erwan menambahkan, bahwa ia akan membuat Surat Edaran kepada camat, kepala desa dan *stakeholder* terkait dana desa yang intinya menegaskan perlunya kehati-hatian. “Artinya prinsip transparansi dan akuntabel harus dijaga,” tuturnya. Ia juga mengimbau agar semua kepala desa dan perangkat desa mampu mengedepankan prinsip tersebut dalam mengelola dana desa. “Kami berharap Dana Desa di kelola dengan bagus, sesuai dengan aturan dan kami juga berharap Danas Desa Tahun Anggaran 2022 berdaya guna efektif untuk kemasyaratan masyarakat,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Mantan Kepala Desa (Kades) Bongkang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yang sekarang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjung.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung, Jhonson Evendi Tambunan, ia membenarkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa, Rabu (26/1/2022). Diketahui, Mantan Kepala Desa Bongkang Kecamatan Haruai tersebut merupakan Kades periode 2012-2018.

Ia membeberkan, pihaknya sudah melakukan penyidikan dan telah menetapkan mantan kepala desa sebagai tersangka terhadap korupsi Dana Desa di Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Tahun Anggaran 2018. “Sudah melakukan penetapan tersangka,” ujarnya pada hari Rabu (26/1/2022) di ruang kerjanya. Ia menuturkan bahwa korupsi dana tersebut dilakukan dari berbagai kegiatan yang uangnya sudah dicairkan. “Uangnya sudah dicairkan namun kegiatannya tidak dilaksanakan,” ucapnya. Lanjut Tambunan, tindak pidana korupsi tersebut terdapat pada beberapa kegiatan dari pemerintahan, pembangunan dan pembinaan. “Dari bidang-bidang itulah ada kerugian,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Tabalong, Yuzan Noor melalui Auditor Muda, Jamaluddin melaporkan hasil pengawasan dari perhitungan kerugian negara terhadap pengelolaan APBDes 2018 Desa Bongkang, Kamis (27/1/2022). “Memang terdapat kerugian negara sebesar Rp. 369.448.500,” ujarnya.

Ia menyampaikan bidang yang menyangkut hal tersebut, yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa nilai kerugiannya sekitar Rp. 25.979.000. Kemudian juga terdapat bidang pelaksanaan pembangunan desa sekitar Rp. 80.409.500, dan bidang ke masyarakat sekitar Rp. 56.050.000. “Itu yang sumbernya dari APBD,” katanya.

Selain dana yang bersumber dari APBD, juga terdapat dana yang bersumber dari APBN, yaitu bidang pembangunan desa sekitar Rp. 207.110.000. “Kebanyakannya memang banyak pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://klikkassel.com/begini-penjelasan-inspektorat-soal-penyalahgunaan-dana-desa/>, Begini Penjelasan Inspektorat Soal Penyalahgunaan Dana Desa, (31/01/22)
2. <https://klikkassel.com/waduh-mantan-kepala-desa-bongkang-diduga-korupsi-dana-desa-2018/>, Waduh! Mantan Kepala Desa Bongkang Diduga Korupsi Dana Desa, (28/01/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan

- b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.